

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SETDA PROV. SUMSEL**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum

Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pertama kali terbentuk pada tanggal 14 Januari 2019 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan telah diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :

- Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - o Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - o Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - o Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - o Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - o Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
 - o Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - o Subbagian Tata Usaha dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - o Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - o Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkaitan dengan tugasnya.

1. Tujuan

Tujuan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa”**

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan adalah mewujudkan pengadaan yang **tepat** (kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, penyedia), **efisien, transparan, dan akuntabel**, serta mendukung **penggunaan produk dalam negeri** dan **peran UMKM**, dengan tujuan akhir **pelayanan publik prima**, peningkatan **daya saing nasional**, dan **pembangunan berkelanjutan** melalui tata kelola pengadaan yang baik dan professional berdasarkan peraturan dan rencana strategis pemerintah.

3. Belanja, Program APBD dan Program APBN

a) Belanja Perangkat Daerah

Total Pagu Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 2.617.380.000 yang terdiri atas :

➤ Belanja operasional : Rp. 2.617.380.000
Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.617.380.000

b) Program dan Anggaran APBD

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Rp. 248.380.000,00

2) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Rp. 2.369.000.000,00

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPD)

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya pada Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP). Nilai ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan) adalah skor predikat yang menilai kinerja pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah, diukur dari pemanfaatan sistem, kompetensi SDM, dan kematangan UKPBJ, dengan skala predikat **Istimewa (100)**, **Sangat Baik (>90)**, **Baik (70-90)**, **Cukup (50-70)**, dan **Kurang (<50)**, bertujuan mendorong efisiensi dan transparansi pengadaan sesuai pedoman LKPP.

No.	Indikator Kinerja	Target 2026 (Nilai ITKP)
1.	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	72 (Baik)

5. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Kewilayahan

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di dalam dan luar Provinsi. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Wilayah kegiatan terbatas pada internal Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov.Sumsel, sedangkan pada Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa lokasi kegiatan mencakup 41 Organisasi Perangkat Daerah dan 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

1. Maksud

Penyusunan laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan diharapkan untuk memberikan laporan capaian program dan kegiatan serta realisasi pertriwulan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai bahan evaluasi dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan ini pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Realisasi (Keuangan, Fisik Dan Kinerja) Dengan Target Kinerja Program/Kegiatan Yang Tercantum Pada DPA Perangkat Daerah

1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah Dana APBD

a) Realisasi Total Belanja

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d.Triwulan ini	Realisasi s.d.Triwulan ini	Target s.d Triwulan ini	Realisasi s.d.Triwulan ini
1	2	3	4	5	6	7
Total Belanja	2.617.380.000	581.891.564	50.00	22.23	50.00	44.43
-Belanja Operasional	2.617.380.000	581.891.564	50.00	22.23	50.00	44.43

b) Realisasi Belanja

No	Program/Kegiatan		Anggaran	Lokasi	Target Keuangan (%)	Realisasi		
						Keuangan		Fisik
						(Rp)	%	%
1	2		3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		248.380.000	PLG	100,00	43.347.500	17.45	
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		161.000.000	PLG	100%	28.440.000	17.66	
	1.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	161.000.000	PLG	100,00	28.440.000	17.66	50.00
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50.000.000	PLG	100%	0	0	
	1.	Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	PLG	100%	0	0	0.00
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		37.380.000	PLG	100%	14.907.500	39.88	
	1.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.380.000	PLG	100,00	14.907.500	39.88	46.15
II	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA		2.369.000.000	PLG	100,00	538.544.064	22.73	
4	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa		689.000.000	PLG	100.00	71.794.984	10.42	
	1.	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	520.000.000	PLG	100,00	42.449.964	8.16	50.00
	2.	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	80.000.000	PLG	100,00	3.960.000	4.95	25.00
	3.	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	89.000.000	PLG	100,00	25.385.020	28.52	50.00
5	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		830.000.000	PLG	100,00	283.479.061	34.15	

	1.	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	660.000.000	PLG	100,00	223.891.949	33.92	50.00
	2.	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	100.000.000	PLG	100,00	27.484.326	27.48	50.00
	3.	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	70.000.000	PLG	100,00	32.102.786	45.86	50.00
6	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa		850.000.000	PLG	100,00	183.270.019	21.56	
	1.	Pembinaan Sumber daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	360.000.000	PLG	100,00	102.451.348	28.46	48.89
	2.	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	190.000.000	PLG	100,00	0	0.00	0.00
	3.	Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	300.000.000	PLG	100,00	80.818.671	26.94	50.00
Jumlah			2.617.380.000		100.00	581.891.564	22.23	

2. Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 TW II

No.	Indikator Kinerja	Target 2026 (Nilai ITKP)	Realisasi 2026 (Nilai ITKP)
1.	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	72 (Baik)	21.29 SIRUP : 0.00 E-tendering : 0.00 E-Katalog : 0.00 Non Tendering : 0.00 Toko Daring : 0.00 E-Kontrak : 0.00 Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan : 0.00 Indikator Kualifikasi dan Kompetensi PBJ : 21.29 Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ : 0.00

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mengacu kepada Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal **Baik** terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan. Indikator tersebut mencakup:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:

1.1. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) >> **bobot 10%**

- 1.2. e-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat) >> **bobot 5%**
- 1.3. e-Purchasing (Toko Daring) >> **bobot eKatalog 4% & Toko Daring 1%**
- 1.4. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing >> **bobot 5%**
- 1.5. e-Kontrak >> **bobot 5%**
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) >> **bobot 30%**
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) >> **bobot 40%**

Pada tahun 2025 penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yaitu sebesar 81.19 dengan predikat **Baik**.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- SIRUP	:10.00
- E-Katalog	: 0.00
- Non e Tendering/Non Purchasing	: 0.00
- E-Tendering	: 5.00
- Toko Daring	: 1.00
- E-Kontrak	: 3.90
- Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	: 21.29
- Tingkat Kematangan UKPBJ	: 40.00

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala

1. Indikator yang ada di Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan bukan hanya kinerja Biro PBJ saja tetapi dipengaruhi juga oleh kinerja dari seluruh OPD terkait dan dinilai oleh eksternal, sehingga dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik disamping kompetensi dan kecakapan.
2. Kinerja pengadaan barang/jasa, baik pada area ketepatan waktu, penghematan biaya, kualitas pengadaan, maupun tingkat layanan, harus terus dilakukan monitoring dan evaluasi agar efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat terus ditingkatkan.
3. Kompetensi personil yang menangani pengadaan barang/jasa perlu terus ditingkatkan dengan melakukan pembinaan secara kontinyu dan berkesinambungan, baik dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, supervisi, dan sejenisnya, dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan yang sering dihadapi.
4. Kompetensi PPK masih sangat sedikit sehingga perlu ada regulasi terkait dukungan dan dorongan peningkatan kompetensi PPK dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga proses pengadaan dapat dilaksanakan sesuai tujuan.

b. Tindak Lanjut yang diperlukan

Untuk ke depannya akan dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi ke perangkat daerah dan pihak eksternal terkait lainnya baik terhadap pihak yang dilakukan pembinaan maupun pihak yang melakukan penilaian serta peningkatan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa dan perlunya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengadaan barang/jasa, baik pada area ketepatan waktu, penghematan biaya, kualitas pengadaan, maupun tingkat layanan sehingga capaian kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih ditingkatkan.